

BAB 3

SITUASI UMUM

3.1. Karakteristik Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bangun

Wilayah hukum Polsek Bangun berada dalam wilayah Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara. Wilayah hukum Polsek Bangun terdiri dari 3 (tiga) wilayah Kecamatan dan 42 (empat puluh dua) wilayah Desa/Nagori. Luas wilayah hukum Polsek Bangun adalah 38.217 Ha, terdiri dari:

(1). Kecamatan Siantar.

Merupakan kecamatan yang paling luas dengan luas wilayah 9.137 Ha. Kecamatan Siantar terdiri dari 17 (tujuh belas) Desa/Nagori yakni:

- a. Nagori Silampuyang.
- b. Nagori Pematang Silampuyang.
- c. Nagori Silau Malaha.
- d. Nagori Silau Manik.
- e. Nagori Marihat Baris.
- f. Nagori Dolok Marlawan.
- g. Nagori Sejahtera.
- h. Nagori Pantoan Maju.
- i. Nagori Rambung Merah.
- j. Nagori Siantar Estate.
- k. Nagori Pematang Simalungun.
- l. Nagori Karang Bangun.
- m. Nagori Laras Dua.
- n. Nagori Nusa Harapan.
- o. Nagori Sitalasari.
- p. Nagori Lestari Indah.
- q. Nagori Dolok Hataran.

(2) Kecamatan Gunung Malela.

Kecamatan Gunung Malela dengan luas wilayah 9.073 Ha terdiri dari 16 (enam belas) Desa/Nagori, antara lain:

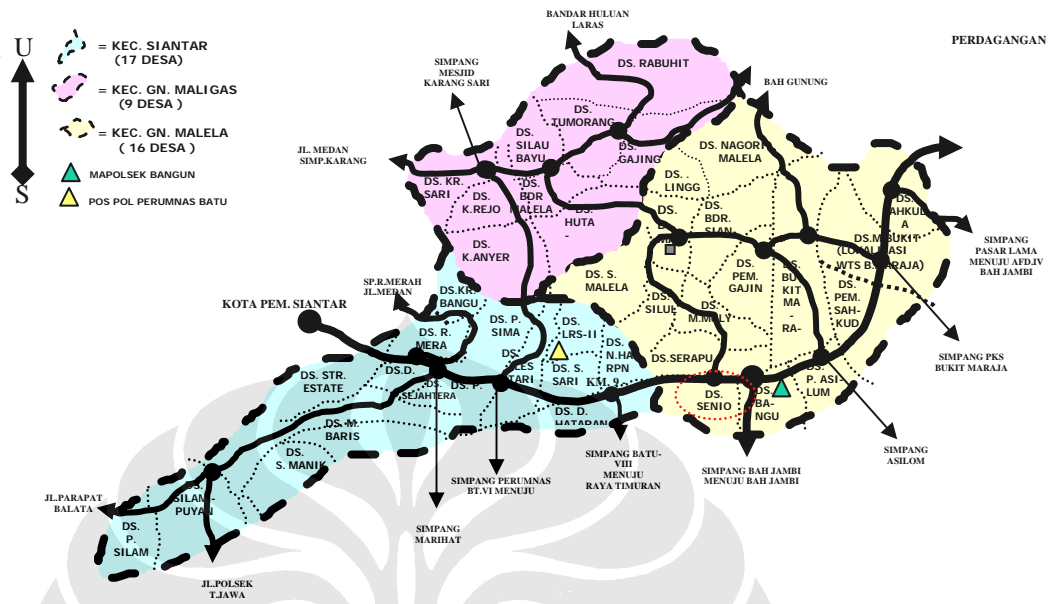
- a. Nagori Senio (lokasi penelitian).
- b. Nagori Bangun.
- c. Nagori Pematang Asilum.
- d. Nagori Serapuh.
- e. Nagori Silou Malela.
- f. Nagori Negeri Malela.
- g. Nagori Lingga.
- h. Nagori Bandar Siantar.
- i. Nagori Dolok Malela.
- j. Nagori Pamatang Gajing.
- k. Nagori Bukit Maraja.
- l. Nagori Sakhuda Bayu.
- m. Nagori Marihat Bukit.
- n. Nagori Pamatang Sakhuda.
- o. Nagori Margo Mulyo.
- p. Nagori Silulu.

(3) Kecamatan Gunung Maligas.

Kecamatan Gunung Maligas dengan luas wilayah 6.045 Ha terdiri dari 9 (sembilan) Desa/Nagori yakni:

- a. Nagori Karang Sari.
- b. Nagori Karang Rejo.
- c. Nagori Karang Anyar.
- d. Nagori Silau Bayu.
- e. Nagori Bandar Malela.
- f. Nagori Rabuhit.
- g. Nagori Tumorang.
- h. Nagori Gajing Jaya.
- j. Nagori Hutadipar.

Sumber: Intel Dasar Polsek Bangun



Gambar 3.1.: Peta Wilayah Hukum Polsek Bangun

Jumlah penduduk di ke tiga kecamatan berjumlah: 115.343 jiwa dengan rincian Laki-laki: 53.678 jiwa dan Perempuan: 61.665 jiwa. Kecamatan Siantar memiliki jumlah penduduk terpadat dengan jumlah penduduk 81.618 jiwa, sementara Kecamatan Gunung Malela memiliki jumlah penduduk sebanyak 45.397 jiwa dan 27.424 jiwa warga tinggal di wilayah Kecamatan Gunung Maligas. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah hukum Polsek Bangun bekerja sebagai petani, peternak lembu, pedagang, karyawan di kebun, supir dan wiraswasta.

Suku bangsa yang berdomisili di wilayah hukum Polsek Bangun antara lain: Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Mandailing, Batak Karo, Jawa, Minang, Nias, Aceh, Banjar, India dan Cina. Suku bangsa-suku bangsa tersebut telah tinggal dan menetap di wilayah tersebut sejak lama. Bahkan telah banyak terjadi perkawinan campur. Perkawinan antar suku bangsa tersebut menambah kohesi antar suku bangsa. Akibat perkawinan warga yang berbeda suku bangsa kemudian menjadi keluarga melalui hubungan kekerabatan. Hubungan antar suku bangsa berlangsung dengan baik dan belum pernah terjadi konflik antar sukubangsa.

Kebudayaan warga di wilayah Hukum Polsek Bangun adalah kebudayaan yang didominasi oleh budaya Batak. Komunitas sebagai kumpulan warga yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas yang tidak jelas dan mereka memiliki kebudayaan sukubangsa sebagai pedoman bagi kehidupan mereka yang sudah menjadi tradisi atau adat. Pedoman ini merupakan pengetahuan dan keyakinan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam menginterpretasi dunia di sekeliling mereka dan diri mereka sendiri, dimana mereka itu menjadi sebagian dari dunianya tersebut, dan secara terseleksi digunakan sebagai acuan dalam mewujudkan tindakan-tindakan untuk memanfaatkan lingkungan beserta isinya bagi pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Menurut Suparlan (2004;248), komunitas (*community*) adalah sebuah satuan kehidupan yang lebih kecil daripada sebuah masyarakat, hidup dalam sebuah wilayah tertentu dengan batas-batas yang tidak jelas, yaitu anggota-anggotanya saling terkait satu sama lainnya melalui berbagai jaringan sosial dan jaringan kekerabatan, karena keturunan dari satu nenek moyang yang sama atau karena melalui perkawinan. Anggota-anggota sebuah komuniti biasanya tergolong dalam satu sukubangsa yang sama, walaupun pada masa sekarang anggota-anggota sebuah komuniti dapat terdiri atas dua sukubangsa atau lebih karena adanya migrasi dari luar. Dalam kehidupan komuniti, kebudayaan sukubangsanya adalah pedoman bagi kehidupan yang sudah menjadi tradisi atau adat, merupakan pengetahuan dan keyakinan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam menginterpretasi dunia di sekeliling mereka dan diri mereka sendiri dimana mereka itu menjadi sebagian dari dunianya tersebut, dan secara terseleksi digunakan sebagai acuan dalam mewujudkan tindakan-tindakan untuk memanfaatkan lingkungan beserta isinya bagi pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Payung Bangun seorang Guru Besar Antropolog IKIP Medan mengatakan bahwa dalam masyarakat Batak stratifikasi sosial dalam kehidupan sehari-hari didasarkan pada tiga prinsip ialah: (a) perbedaan tingkat umur, (b) perbedaan pangkat jabatan, (c) perbedaan sifat keaslian, dan (d) status kawin. Pada masyarakat Batak pembedaan hak dan kewajiban, terutama dalam upacara adat sangat terlihat. Dalam upacara adat hanya para *tua-tua* yang berhak mengajukan

saran-saran pengambil keputusan, sedangkan anak muda hanya sebagai pelaksana bahkan anak-anak tidak diperhitungkan samasekali. Termasuk juga terhadap mereka yang memiliki jabatan (keturunan raja, kepala wilayah, kaum bangsawan, pemimpin agama dan aliran kepercayaan, dan orang yang memiliki keahlian). Mereka yang dianggap memiliki jabatan akan mendapat perlakuan yang berbeda dibanding mereka yang tidak memiliki jabatan (warga biasa). Demikian juga dalam hal menyelesaikan perselisihan/sengketa tanah, mereka yang dianggap sebagai orang asli (*merga tanah*) akan lebih dibandingkan dengan mereka yang bukan penduduk asli (pendatang). Warga asli memiliki hak lebih untuk menempati jabatan-jabatan pemimpin desa. Singarimbun (1965) menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam lingkungan masyarakat Batak dipegang oleh mereka yang berasal dari turunan tertua dari *merga tanah* (Koenjtaraningrat, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa keturunan raja, orang-orang tua, pemilik jabatan, warga asli, dan kaum bangsawan dalam komunitas yang memiliki kebudayaan Batak memiliki peranan besar dalam mempengaruhi warga komunitasnya.

3.2. Kepolisian Sektor Bangun

Polsek Bangun adalah suatu organisasi kepolisian tingkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang berpangkat Inspektur Satu (Iptu) yang bertugas memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya. Dalam menjalankan tugasnya Polsek Bangun berpedoman pada UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Keputusan Kapolri No.Pol.:Kep/54/X/2002.

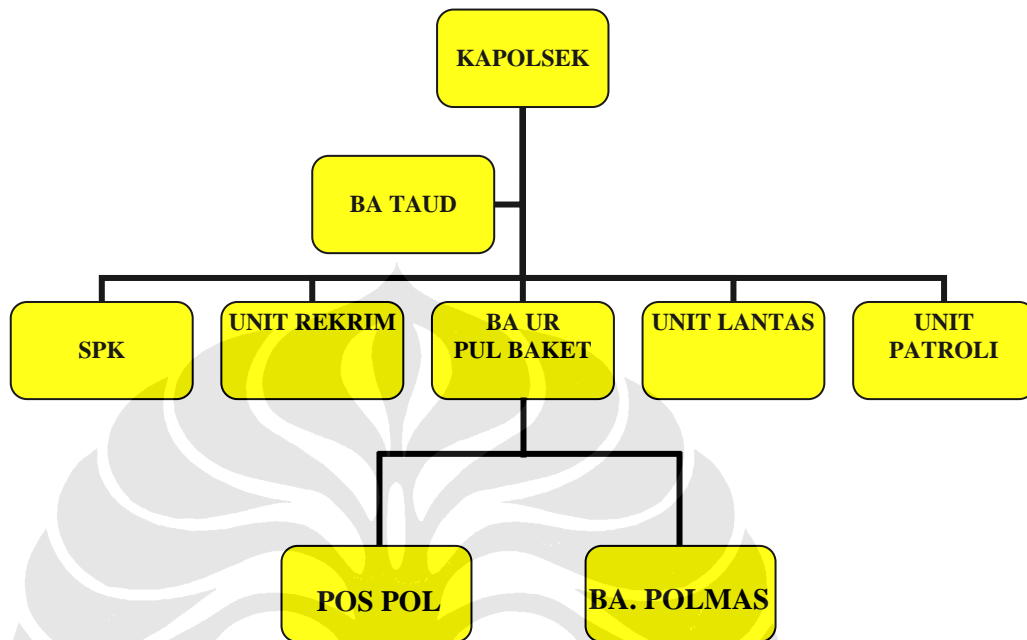
Polsek Bangun bertugas menyelenggarakan tugas pokok kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas kepolisian lain dalam wilayah hukum Polsek Bangun sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas, Polsek Bangun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: *pertama*, pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan dan permintaan bantuan,

pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat ijin/keterangan termasuk pemberian Surat keterangan Catatan Kriminal (SKCK), *kedua*, melakukan pengumpulan bahan keterangan baik sebagai bagian dari kegiatan intelijen keamanan yang diselenggarakan oleh satuan-satuan maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polsek dalam rangka mencegah gangguan kamtibmas, *ketiga*, penyelenggaraan kegiatan patroli termasuk pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah dalam rangka memelihara kamtibmas termasuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya, *keempat*, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *kelima*, melaksanakan pembinaan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan serta peran serta masyarakat dalam pengamanan swakarsa, dan *keenam*, menyelenggarakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kapolsek Bangun dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Kapolres Simalungun khususnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Kapolsek Bangun dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa staf di masing-masing bidang. Di bidang Operasional Kapolsek Bangun dibantu Kanit Reskrim, Kanit Patroli, Ka. SPK dan Ka. Pos Lintas, dan Ba. Pulbaket dan Ba. Polmas. Di bidang Administrasi Kapolsek Bangun dibantu oleh Ba. Taud. Polsek Bangun memiliki 1 (satu) buah pos polisi yakni Pos Batu Anam. Pos tersebut diawasi oleh 7 (tujuh) personil dibawah pimpinan seorang Bintara Tinggi. Lokasi Pos Polisi Bt.VI tersebut terletak di Jl.Asahan Km.6. Pelaksanaan operasional fungsi kepolisian dilaksanakan di masing-masing unit operasional seperti Unit Reskrim, Unit Patroli, Pos Lintas, Baur Pul Baket dan Ba Polmas.

Berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol.:Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 maka struktur organisasi Polsek Bangun adalah seperti terlihat pada Gambar 3.2.. Dalam struktur organisasi tersebut Polsek Bangun telah membuat satu langkah terobosan dengan mengganti Babinkamtibmas menjadi Ba. Polmas. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kapolri sehubungan dengan implementasi Polmas.

Sumber: Kep.Kapolri No.Pol.:Kep/54/X/2002



Gambar 3.2. : Struktur Organisasi Polsek Bangun

Jumlah personil polisi Polsek Bangun secara keseluruhan adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dengan perincian sebagai berikut: Pama (Perwira Pertama): 2 (dua) orang, Bintara: 40 (empat puluh) orang dan 1 (satu) orang pegawai honorer. Pembagian tugas personil Polsek Bangun terdiri dari Kapolsek 1 (satu) orang, Ka.SPK 1 (satu) orang, Taud 2 (dua) orang, Unit Reskrim 11 (sebelas) orang, Unit Patroli 9 (sembilan) orang, Unit Lantas 3 (tiga) orang, Pos Batu VI 7 (tujuh) orang, Ur.Pulbaket 2 (dua) orang, Ba.Polmas 2 (dua) orang dan Ba.Polsek 5 (lima) orang. (Lihat Tabel 3.1.)

Tabel 3.1.: Data Personil Polsek Bangun

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN
1.	H.SITUMORANG	IPTU	73040045	KAPOLSEK
2.	M.NABABAN	IPTU	59120944	KANIT RESKRIM
3.	S.SIANTURI	AIPTU	50030128	KATAUD
4.	H.MANURUNG	AIPTU	53100106	KANIT PATROLI
5.	M.SIRAIT	AIPTU	56060041	KA POS POL BT.VI

6.	HAIRUL ASWAN	AIPTU	60090727	BANIT RESKRIM
7.	H.TAMPUBOLON	AIPTU	55020127	BAUR PULBAKET
8.	ANDO SINAGA	AIPTU	61080710	KA SPK
9.	NASRUL	AIPTU	64110667	BA POLMAS
10.	RUSDIAHYA	AIPTU	65050479	BA POS POL BT.VI
11.	S.E.HUTAGALUNG	AIPTU	62121006	BANIT PATROLI
12.	THAMRIN	AIPTU	65050479	BANIT PATROLI
13.	SANTIAN HUTAPEA	AIPTU	63040432	BA POLSEK
14.	AMRIL YUSNANDI	AIPTU	66120443	BA POS POL BT.VI
15.	J.F.SARAGIH	AIPTU	66080301	BA POLMAS
16.	EFENDI MARPAUNG	AIPDA	66050055	BANIT RESKRIM
17.	AMEN SIPAYUNG	BRIPKA	60020405	BA POS POL BT.VI
18.	D.PASARIBU	BRIPKA	69080273	BANIT PATROLI
19.	R.SILALAH	BRIPKA	59040240	BANIT PATROLI
20.	J.SIJABAT	BRIPKA	56050143	BA POS POL BT.VI
21.	M.BUTAR-BUTAR, SH	BRIPKA	74080032	BA POLSEK
22.	SYAHRIAL LUBIS	BRIPKA	73010106	BANIT RESKRIM
23.	J.PANJAITAN	BRIPKA	73090117	BANIT RESKRIM
24.	S.R.SIREGAR	BRIPKA	63120280	BANIT RESKRIM
25.	RAMLI	BRIPKA	64100067	BANIT RESKRIM
26.	ISRAN HAREFA	BRIPKA	63010352	BANIT RESKRIM
27.	JAP HUTAURUK	BRIPKA	73090280	BAUR PUL BAKET
28.	H.SIANIPAR	BRIPKA	58120116	BANIT PATROLI
29.	M.SIMANGUNSONG	BRIGADIR	72100151	BA POLSEK
30.	YUDI ADIANTO	BRIGADIR	79050661	BANIT PATROLI
31.	T.R.SIMANJUNTAK	BRIGADIR	79070539	BANIT PATROLI
32.	YOHANES HALIM	BRIGADIR	79040631	BAMIN RESKRIM
33.	RIDWAN JUNED	BRIPKA	57040644	BA POS POL BT.VI
34.	EDI SASTRIA	BRIPKA	83010457	BANIT RESKRIM
35.	REINHARD SIREGAR	BRIPKA	82050506	BA POLSEK
36.	YUSRIADI PUTRA	BRIPKA	81030070	BA POLSEK
37.	FRANS SIMANJUNTAK	BRIPKA	85080129	BAMIN RESKRIM
38.	P.MARBUN	BRIPKA	80010092	BA POS POL BT.VI
39.	E.MATONDANG	BRIPKA	58040521	BA NIT PATROLI
40.	M.SITUMORANG	AIPTU	56020336	KA POS LANTAS
41.	A.GINTING	BRIGADIR	76080179	BA POS LANTAS
42.	MUSTARI	BRIPKA	58010184	BA POS LANTAS
43.	SANTI SIAGIAN	PHL	-	STAFF TAUD

Sumber: Intel Dasar Polsek Bangun

Dengan wilayah yang meliputi 3 (tiga) Kecamatan dan 42 (empat puluh dua) Nagori, Polsek Bangun hanya memiliki 4 (empat) Ba.Polmas. Idealnya dengan mengadopsi model Polmas, Polsek Bangun harus menempatkan (satu) Ba.Polmas di tiap Nagori. Untuk itu dibutuhkan 42 (empat puluh dua) Ba.Polmas. Sementara personil Polsek Bangun hanya memiliki 42 (empat puluh dua) personil dengan 1 (satu) PHL. Tentu tidak mungkin Polsek Bangun memenuhi kondisi ideal Polmas. Kapolsek Bangun menerangkan:

”Anggota saya jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayah. Belum lagi jumlah penduduk yang menyebar di seluruh wilayah. Untuk menjangkaunya semua wilayah kami kewalahan. Wilayah yang menjadi tanggung jawab Polsek Bangun sangat luas. Sulit bagi kami membagi anggota untuk menangani semua beban pekerjaan. Sementara saya menunjuk 4 (empat) orang saja sebagai Ba.Polmas.”

Bangunan atau gedung kantor dan perumahan milik Polsek Bangun tidak dapat mencukupi kebutuhan kantor dan perumahan bagi seluruh anggota Polsek Bangun. Asrama untuk perumahan hanya ada 1 (satu) unit dan digunakan sebagai perumahan Kapolsek. Sebagian besar anggota Polsek Bangun bertempat tinggal di Kotamadya Pematang Siantar dengan yang jarak antara Kota Pematang Siantar dengan Mapolsek Bangun \pm 20 Km dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan pribadi adalah \pm 20 menit (sebagian besar anggota menggunakan kendaraan R-2).

Tabel 3.2.: Data Bangunan/gedung Kantor dan Perumahan Milik Polsek Bangun

No	Jenis Bangunan	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
01	Mapolsek	1	-	-	1
02	Rumah Dinas	1	-	-	1
Jumlah		2	-	-	2

Sumber: Intel Dasar Polsek Bangun

Dalam melakukan komunikasi dengan Polres Simalungun, Pos Polisi, Unit Patroli dan Unit Lantas dan seluruh jajaran Polsek Bangun menggunakan sarana HT (*Handy Talky*) sebagai alat komunikasi yang utama. Disamping itu sejalan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka selain memanfaatkan alkom milik dinas anggota Polsek Bangun juga memanfaatkannya sarana telepon genggam yang seluruh anggota Polsek Bangun telah memilikinya. Adapun kondisi Alat Komunikasi yang digunakan dalam mendukung operasional Polsek Bangun dapat dilihat pada Tabel 3.3..

Tabel 3.3. : Data Alkom PolsekBangun

No	Jenis	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
01	HT.Motorolla	2	-	-	2
02	HT.RIG	1	-	-	1
03	SSB	-	-	1	1
04	Telepon	1			1
Jumlah		4	-	1	5

Sumber: Intel Dasar Polsek Bangun

Untuk mendukung kelancaran operasional Polsek sehari-hari, Polsek Bangun memiliki sejumlah kendaraan bermotor yang merupakan kendaraan dinas. Sampai saat ini kendaraan dinas tersebut seluruhnya masih dapat difungsikan dengan baik. Kendaraan dinas tersebut terdiri dari 1 (satu) kendaraan R-4 dan 11 (sebelas) kendaraan R-2. 4 (empat) unit kendaraan dinas R-2 tersebut digunakan oleh Ba. Polmas dalam kegiatan sehari-hari. Dukungan bahan bakar untuk kendaraan dinas yang khusus digunakan anggota Ba Polmas dalam kegiatannya sehari-hari seperti patroli, sambang dan lain-lain, diberikan insentif bulanan sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per bulan. Kendaraan bermotor yang dapat digunakan dalam mendukung kegiatan operasional Polsek Bangun dapat dilihat pada tabel di Tabel 3.4..

Tabel 3.4.: Data Kendaraan R-2 dan R-4 Polsek Bangun

No	Jenis	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
01	Ranmor R-4	-	1	-	1
02	Ranmor R-2	8	3	-	11
Jumlah		8	4	-	12

Sumber: Intel Dasar Polsek Bangun

3.3. Bintara Polmas Polsek Bangun

Bob Trojanowicz menjelaskan bahwa implementasi Pemolisian Komunitas memerlukan petugas khusus dengan kemampuan yang khusus. Petugas Pemolisian Komunitas bertugas membangun komunitas dan bersama warga menangani masalah berdasarkan kebutuhan komunitas. Petugas Pemolisian Komunitas ditempatkan di lingkungan terbatas sebagai polisi lingkungan. Tujuannya agar petugas Pemolisian Komunitas dapat lebih memahami

lingkungannya, mengenal warganya dan dekat dengan warganya. Petugas Pemolisian Komunitas harus memiliki dedikasi untuk membangun komunitas, kreatif, dan memiliki inisiatif untuk membuat lingkungan menjadi aman sebagai tempat tinggal dan tempat bekerja. Skep Kapolri No.Pol.:Skep/737/X/2005 menegaskan bahwa petugas Polmas merupakan ujung tombak yang berperan sebagai fasilitator dan katalisator yang memungkinkan beroperasinya Polmas dan sekaligus penghubung antara kesatuan Polri dan komunitas. Untuk itu Polsek Bangun menetapkan 4 (empat) anggota berpangkat Bintara sebagai petugas yang khusus mengimplementasikan Pemolisian Komunitas di wilayah hukum Polsek Bangun. Petugas tersebut disebut dengan sebutan Bintara Perpolisian Masyarakat atau disingkat Ba.Polmas.

Ba.Polmas adalah unsur staf pembantu Kapolsek yang bertugas menyelenggarakan tugas-tugas Polmas. Tugas-tugas Ba.Polmas adalah untuk membangun kemitraan maupun menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat di wilayah penugasannya. Yang dilakukan oleh Ba.Polmas adalah memahami kebutuhan rasa aman warga masyarakat, membangun kemitraan untuk mencari akar masalah (komunikasi, sambang, tatap muka, membangun FKPM), menciptakan dan memelihara kamtibmas (memetakan wilayah, memahami karakteristik daerah, mengidentifikasi masalah (PH, FKK, dan AF)), menjadi pelindung, pengayom, pelayan dan penegak hukum yang dipercaya (patroli, pelayan masyarakat (menerima laporan, mendatangi TKP, jasa konsultasi, jasa petunjuk, pengaturan). Oleh karena itu Ba Polmas harus mempunyai kemampuan berkomunikasi dan memahami corak masyarakat dan kebudayaan setempat (khususnya bahasa lokal).

Namun demikian pembentukan petugas yang khusus mengimplementasikan Polmas juga menghadapi masalah. Salah satu masalah yang muncul adalah adanya penolakan dari sesama polisi. Petugas yang bukan petugas Polmas mengatakan bahwa membangun komunitas adalah tanggung jawab Ba.Polmas—bukan pekerjaan polisi. Anggota Ba.Polmas menjelaskan:

“Kadang-kadang kami lemas juga Pak. Rekan-rekan dari fungsi lain seakan meremehkan tugas Ba.Polmas. Mereka mengatakan bahwa tanpa Polmas pun polisi bisa jalan. Masalah warga yang sudah bisa kami selesaikan sering

mentok di teman sendiri. Makanya kami sering juga malu sama warga. Kami panjang lebar bicara tentang Polmas kepada warga tetapi kawan dari fungsi lain tidak mendukung.”

Pada tahap awal Kapolsek Bangun membuat kebijakan dengan menunjuk Babinkamtibmas sebagai Ba. Polmas. Anggota Babinkamtibmas adalah petugas polisi yang selama ini telah melaksanakan tugas Bimmas, Binkamtimas dan Siskamswakarsa. Tugas-tugas tersebut dirasakan memiliki kemiripan dengan tugas Ba.Polmas walaupun tidak sepenuhnya sama. Perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Oleh karena itu untuk mempermudah tahap persiapan implementasi Polmas maka anggota Babinkamtibmas ditunjuk dan dibuat langsung Sprin baru sebagai petugas Polmas. Anggota Ba. Polmas mengatakan:

”Kami anggota Ba. Polmas adalah bekas anggota Babinkamtibmas. Kami ditunjuk oleh pimpinan sebagai Ba.Polmas. Menurut Kapolsek tugas kami adalah mengimplementasikan Polmas di wilayah tanggung jawab kami sesuai Sprin. Tapi kami belum pernah mengikuti pelatihan khusus Polmas. Apa saja tugasnya kami sendiri belum jelas. Untuk sementara target kami adalah membuat laporan kegiatan Polmas ke Polres sesuai dengan format laporan yang telah dibuat.”

Menurut Kapolsek Bangun pengangkatan mantan Babinkamtibmas sebagai Ba.Polmas didasari oleh pemahaman bahwa anggota Babinkamtibmas sudah memiliki pengalaman dan paham akan Bimmas, Binkamtimas dan Siskamswakarsa, mereka lebih mengenal wilayah, dan diyakini dapat lebih mudah berkomunikasi dengan warga udalam mensosialisasikan Polmas kepada masyarakat. Penempatan Ba Polmas didasarkan pada perkiraan keadaan dan kebutuhan sesuai dengan karakteristik wilayah. Sebenarnya Polsek Bangun mengajukan 8 (delapan) petugas Ba.Polmas berikut dengan pembagian wilayah tugasnya. Namun Sprin yang keluar dari Polres hanya 4 (empat) orang. Dalam melakukan seleksi anggota Ba.Polmas, Kapolsek mempertimbangkan beberapa faktor antara lain pengalaman tugas, tempat tinggal petugas, latar belakang penugasan, latar belakang pendidikan dan catatan kinerja petugas. Pola kerja Ba.Polmas berbeda dengan pola kinerja polisi pada umumnya. Petugas Ba Polmas harus dapat bekerja mandiri, pandai berkomunikasi, memiliki kemampuan

kepemimpinan dan memahami budaya lokal. Namun demikian keputusan pengangkatan Ba.Polmas sepenuhnya ada di Kapolres dan Kapolda. Kapolsek hanya berperan mengajukan calon Ba.Polmas dan membina para petugas Ba.Polmas yang telah dikeluarkan Sprin-nya oleh Kapolres dan Kapolda. Kapolsek memberi keterangan:

”Polsek sebenarnya mengajukan 8 (delapan) anggota sebagai Ba.Polmas dan kami sudah tentukan wilayah penugasannya. Tapi Sprin yang keluar dari Polres hanya 4 (empat) orang dan wilayah penugasannya pun sudah tidak sesuai dengan yang diajukan. Mungkin Sprin dibuat hanya 4 (empat) karena adanya keterbatasan anggaran. Setiap anggota Ba.Polmas mendapat insentif Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per bulan”.

Penugasan Ba Polmas pada wilayah tertentu dalam waktu yang lama bertujuan untuk meniadakan ketidak-kenalan pada kedua pihak. Dengan penugasan yang lebih lama dan tetap maka polisi tidak hanya saling kenal tapi juga saling memahami. Untuk itu salah satu upaya mendekatkan polisi dengan warga adalah dengan menugaskan anggota Polsek pada wilayah dimana ia juga berdomisili di lingkungan tersebut. Petugas Polmas yang tinggal bersama dengan warga akan lebih kenal, dekat dan lebih memahami warga.

Ba.Polmas Aiptu Nasrul berdomisili di Nagori Senio. Dalam Sprin yang dikeluarkan oleh Polres wilayah penugasannya di Nagori Karang Anyar yang berada di Kecamatan Gunung Maligas. Waktu tempuh tempat tinggal Aiptu Nasrul dengan Nagori Karang Anyar adalah 30 (tiga puluh) menit dengan menggunakan sepeda motor. Ba.Polmas Briпка Syahrial Lubis berdomisili di Nagori Senio. Dalam Sprin yang dikeluarkan oleh Polres wilayah penugasannya meliputi Kecamatan Gunung Malela yang terdiri dari 16 (enam belas) Nagori termasuk Nagori Senio. Untuk dapat mengunjungi semua Nagori membutuhkan waktu 10 (sepuluh) hari. Karena memiliki tugas lain sebagai anggota Unit Reskrim maka kunjungan ke Nagori-nagori dilakukan jika ada kegiatan atau kasus. Ba.Polmas Briпка Dorlan Pasaribu yang juga anggota pada Unit Patroli berdomisili di Kota Siantar. Sesuai dengan Sprin yang dikeluarkan oleh Polres wilayah penugasannya adalah di Nagori Nusa Harapan. Waktu tempuh dari tempat tinggalnya ke wilayah penugasan adalah 15 (lima belas) menit dengan

menggunakan sepeda motor. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Ba.Polmas, Bripka Dorlan Pasaribu sekaligus memenuhi kewajibannya sebagai anggota Unit Patroli. Kegiatannya terlihat lebih mudah karena sifat tugas patroli hampir mirip dengan tugas Ba.Polmas. Sambil melakukan patroli, Bripka Dorlan Pasaribu melaksanakan kunjungan ke warga-warga yang berada di wilayah tanggung jawabnya. Namun wilayah tanggung jawab Unit Patroli adalah seluruh wilayah Polsek Bangun. Akibatnya waktu untuk mengunjungi warga menjadi sangat sedikit. Ba.Polmas Aiptu Jhon F.Saragih adalah anggota polmas yang tidak memiliki tugas rangkap. Namun kondisi kesehatannya yang menurun membuat kegiatannya sangat terbatas.

Tabel 3.5. : Data Ba. Polmas Polsek Bangun dan Wilayah Penugasan

No	Nama	Pangkat	Wilayah Penugasan	Keterangan
01.	Nasrul	Aiptu	Nagori Karang Anyar	Batud
02.	Syahrial Lubis	Bripka	Kecamatan Gunung Malela	Banit Reskrim
03.	Dorlan Pasaribu	Bripka	Nagori Nusa Harapan	Banit Patroli
04.	Jhon F. Saragih	Aiptu	Nagori Dolok Hataran	Ba Polmas

Polsek Bangun memiliki 4 (empat) Bintara Polmas yang memiliki tugas khusus mengimplementasikan Polmas di wilayah hukum Polsek Bangun. Petugas Polmas merupakan kepanjangan Polsek dalam melaksanakan tugas Polmas. Berdasarkan Surat Perintah Kapolres Simalungun No.Pol.: Sprin/65/I/2008 tanggal 28 Januari 2008, anggota Ba Polmas baru telah ditetapkan. Ke empat Ba.Polmas yang ditunjuk adalah mantan anggota Babinkamtibmas yang saat ini sudah menempati bidang tugas lain. Aiptu Nasrul selain sebagai Ba.Polmas, menjabat sebagai Ka.Taud Polsek Bangun. Bripka Syahrial Lubis adalah anggota Unit Reskrim selain menjabat Ba.Polmas. Bripka Dorlan Pasaribu adalah anggota Unit Patroli selain menjabat sebagai Ba.Polmas. Sebagian besar anggota Ba.Polmas memiliki tugas rangkap. Akibatnya kinerja Ba.Polmas menjadi tidak maksimal. Ba.Polmas memerlukan waktu yang longgar dalam bertugas agar dapat bersosialisasi dengan warga.

Pelaksanaan tugas Ba.Polmas idealnya adalah pada wilayah yang terbatas dan tidak terlalu luas agar lebih mudah membuat prioritas kegiatan. Oleh karena

itu penugasan Ba.Polmas ditentukan pada satu wilayah tugas yang kecil dan jelas batas-batasnya. Dalam praktek pelaksanaannya tugas anggota Ba Polmas tidak selamanya berdasarkan wilayah yang telah ditentukan. Karena luasnya wilayah penugasan maka anggota Ba.Polmas bertugas berdasarkan kegiatan yang ada selain bertanggung jawab memonitor wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai Sprin. Tiap-tiap anggota Ba Polmas secara bergantian memenuhi kewajiban tugas Ba. Polmas yang diberikan baik oleh Polda, Polres maupun dari Polsek. Sebagaimana yang disampaikan oleh anggota Ba Polmas:

“Kami anggota Ba Polmas hanya 4 (empat) orang sementara wilayah sangat luas ada 42 nagori dan kami bukan hanya melakukan tugas-tugas Polmas saja karena kami juga tugas rangkap. Makanya yang kami kerjakan apa yang Polda, Polres atau Polsek perintahkan saja dan saat ini kami menargetkan minimal satu kali dalam seminggu kami ada kegiatan sebagai bahan laporan ke Polres”.

Kegiatan Ba.Polmas yang telah dilakukan adalah melakukan patroli sekaligus melakukan kunjungan ke warga-warga, menghadiri kegiatan warga, menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah, melakukan penjagaan pada kegiatan-kegiatan masyarakat, pengawalan dan pengaturan lalu lintas ketika anak sekolah selesai belajar, dan mewakili Kapolsek mengikuti rapat atau pertemuan di Nagori maupun di Kecamatan. Pelaksanaan tugas Polmas selama ini juga tidak dapat berjalan dengan maksimal karena disamping personil sangat terbatas, anggaran yang terbatas dan juga tidak jelasnya petunjuk dari Polres tentang tugas Ba Polmas. Anggota Ba.Polmas mengatakan:

”Kami anggota Ba.Polmas juga masih belum paham betul tentang Polmas, kami adalah mantan anggota Babinkamtibmas yang diangkat sebagai Ba.Polmas. Kami bekerja sesuai petunjuk yang diberikan oleh Kabag Binamitra. Sementara anggota yang pernah mengikuti pendidikan Polmas di Medan tidak pernah ditugaskan sebagai Polmas bahkan orangnya sudah pindah”.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Ba Polmas bertanggung jawab kepada Kapolsek. Ba Polmas melaporkan setiap kegiatan yang mereka laksanakan sehari-hari dan hasil kegiatan tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan laporan ke

Polres dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Ba.Polmas dilengkapi dengan beberapa buku administrasi yakni:

- (1) Buku Register Surat keluar / masuk.
- (2) Buku Kegiatan Petugas Polmas.
- (3) Buku Keluhan/Pengaduan warga masyarakat dan Penyelesaiannya.
- (4) Formulir Laporan Mingguan/Bulanan.
- (5) Formulir Laporan Informasi.
- (6) Formulir Laporan Hasil Penanganan Perkara Ringan/Pertikaian Warga.
- (7) Formulir Surat Kesepakatan Bersama.

Selama periode Januari s/d Desember 2007 berdasarkan catatan kegiatan Ba Polmas Polsek Bangun maka beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota Ba. Polmas adalah:

- (1) Menjadi Inspektur Upacara di sekolah-sekolah.
- (2) Mengikuti rapat pertemuan dengan Camat dan Pangulu.
- (3) Menghadiri acara keagamaan.
- (4) Mengadakan patroli dan anjagsana ke rumah-rumah warga.

Untuk dapat dilakukan analisa dan evaluasi terhadap kinerja anggota Ba.Polmas maka dalam Keputusan Kapolri tentang penerapan model Polmas maka ditentukan indikator-indikatornya. Adapun indikator-indikator yang menunjukkan keberhasilan petugas Ba.Polmas dilihat dari :

- (1) Intensitas kegiatan forum baik kegiatan pengurus maupun keikutsertaan warganya.
- (2) Kemampuan forum menemukan dan mengidentifikasi akar masalah.
- (3) Kemampuan petugas Ba.Polmas dalam menyelesaikan masalah termasuk konflik/pertikaian warga.
- (4) Kemampuan mengakomodir/menanggapi keluhan masyarakat.
- (5) Intensitas dan ekstensitas kunjungan warga oleh petugas Polmas.

Dalam menilai kinerja Ba. Polmas, Kapolsek menjadikan laporan mingguan yang dibuat anggota Ba. Polmas sebagai indikator. Prestasi kerja Ba.Polmas dinilai dari jumlah kegiatan yang dilakukan setiap minggunya. Selain Kapolsek

juga melakukan cek silang kepada warga terhadap pekerjaan Ba.Polmas. Kapolsek mengatakan:

”Saya mengecek anggota Ba. Polmas bekerja atau tidak melalui laporan Mingguan yang mereka buat untuk dilaporkan ke Polres. Semakin banyak kegiatan yang mereka laporkan maka saya melihat mereka bekerja dengan baik. Bagaimana hasilnya di lapangan apakah ada atau tidak dampaknya pada warga setelah Polmas di jalankan saya belum pernah survei namun dari apa yang saya peroleh di lapangan melalui kunjungan saya ke beberapa tokoh, mereka mengatakan Polmas sudah berjalan dan mulai di kenal warga. Bagi saya yang penting anggota Ba. Polmas harus memiliki bahan untuk menjadi laporan ke Polres. Saya juga menyadari personel Polsek sangat terbatas dengan wilayah yang sangat luas sehingga target saya kepada anggota Ba. Polmas juga tidak muluk-muluk. Asal mereka bisa memenuhi laporan ke Polres maka saya anggap cukuplah.”

Dari hasil survei yang dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan dan isian atau angket dengan menanyakan kegiatan Ba.Polmas dalam mendengarkan keluhan warga dan mengunjungi warga maka diperoleh fakta bahwa anggota Ba.Polmas telah melakukan kegiatan mendengarkan keluhan warga dan melakukan kunjungan warga. Namun intensitasnya masih lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapat warga yang mengatakan bahwa anggota Ba.Polmas tidak mendengarkan keluhan warga dan tidak melakukan kunjungan. Hasil survei tersebut adalah sebagai berikut: 34% warga mengatakan bahwa Ba.Polmas mendengarkan keluhan warga dan 48% warga yang mengatakan Ba.Polmas tidak mendengarkan keluhan warga. 28% warga mengatakan Ba.Polmas mengunjungi warga dan 52% warga mengatakan bahwa Ba.Polmas tidak mengunjungi warga. Pendapat tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.6..

Tabel 3.6. : Pendapat Warga Terhadap Kegiatan Anggota Ba. Polmas

Kegiatan Ba. Polmas	Komunitas						Jumlah		
	Geografis			Kepentingan			Ya	Tdk	Tdk Jwb
	Ya	Tdk	Tdk Jwb	Ya	Tdk	Tdk Jwb			
Mendengarkan Keluhan Warga	25 (34%)	42 (56%)	7 (10%)	9 (34%)	5 (20%)	12 (46%)	34 (34%)	48 (48%)	19 (19%)
Mengunjungi Warga	23 (31%)	42 (56%)	9 (13%)	5 (20%)	10 (38%)	11 (42%)	28 (28%)	53 (52%)	20 (20%)

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa frekuensi kunjungan anggota Ba.Polmas ke rumah warga masih rendah. Akibatnya warga melihat bahwa polisi belum mau mendengarkan keluhan atau kebutuhan warga. Kunjungan kerumah warga berbanding lurus atau sejalan dengan kegiatan mendengarkan keluhan atau kebutuhan warga. Dalam melakukan kunjungan disana juga anggota Ba.Polmas sekaligus melakukan wawancara dengan warga, menanyakan permasalahan warga, menyampaikan informasi atau pesan-pesan kamtibmas dan lain-lain. Oleh karena itu karena frekuensi kunjungan masih rendah maka warga melihat kepedulian polisi pada keluhan atau kebutuhan warga juga dianggap masih rendah. Hal ini terjadi karena ternyata disamping sebagian besar petugas Ba.Polmas belum mendapat pelatihan khusus juga karena anggota Ba.Polmas masih merangkap jabatan. Dalam tugas-sehari-hari anggota Ba.Polmas masih dituntut dengan pekerjaan lain. Akibatnya anggota Ba.Polmas mengalami kendala untuk melakukan kunjungan. Melakukan kunjungan memerlukan waktu yang longgar karena lokasi tempat tinggal warga cukup jauh. Kunjungan ke rumah warga juga tidak mungkin dilakukan pada pagi atau siang hari karena warga sebagian besar melakukan pekerjaannya pada waktu tersebut. Oleh karena itu anggota Ba.Polmas melakukan kunjunga pada sore hari menjelang malam. Kondisi ini terasa memberatkan bagi anggota Ba.Polmas karena kesulitan membagi waktu untuk keluarga, istirahat dan untuk dinas. Untuk menyiasatinya anggota Ba.Polmas melakukan kunjungan ke rumah warga apabila ada perintah atau target pekerjaan dari Polres atau Polda. Pada saat peneliti melakukan wawancara sekitar pukul 16.25 Wib anggota Ba.Polmas mengatakan:

”Kami anggota Ba.Polmas masih rangkap jabatan Pak. Wilayah jangkauan sangat luas. Pekerjaan di kantor saja sudah banyak kali. Sampai jam segini saja kami masih di kantor. Jam berapa lagi kami bisa berkunjung melakukan anjangsana ke rumah warga. Akhirnya kami kerja Ba.Polmas kalau ada perintah sajalah.”

Idealnya dalam implementasi Polmas pada tiap-tiap Nagori ditempatkan 1 (satu) petugas Ba.Polmas. Luas wilayah Polsek Bangun sangat jauh dibandingkan dengan jumlah personilnya sehingga tidak mungkin menempatkan petugas sesuai dengan harapan model Polmas. Untuk itu pada tahap awal kebijakan Kapolsek

Bangun menempatkan anggota Ba.Polmas pada wilayah-wilayah yang dianggap rawan. Kerawanan suatu daerah dilihat dari angka kejahatan yang terjadi di wilayah tersebut dalam kurun waktu tertentu. Catatan tersebut berdasarkan berdasarkan laporan yang didapat dari warga. Pada tahap ini wilayah yang telah memiliki Ba.Polmas antara lain: Nagori Karang Anyar di Kecamatan Gunung Maligas, Kecamatan Gunung Malela, Nagori Nusa Harapan dan Nagori Dolok Hataran di Kecamatan Siantar..

Untuk menutupi keterbatasan anggota Polmas maka Kapolsek membuat kebijakan dengan memerintahkan seluruh personil Polsek agar melaksanakan Polmas baik ketika menjalankan tugas sesuai bidangnya dan juga ketika sedang tidak ada kesibukan seperti ketika berada di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari. Kebijakan pimpinan dalam suatu organisasi akan memberi dampak bagi perkembangan organisasi itu sendiri, untuk dapat meraih tujuan lebih maksimal maka perlu diambil suatu kebijakan. Kebijakan itu sendiri akan berjalan dengan baik apabila ada koordinasi yang baik diantara pihak-pihak yang terlibat. Keterangan Kapolsek menyebutkan:

”Karena keterbatasan personil tidak mungkin menempatkan satu Bintara Polmas di tiap Nagori, apalagi Polsek saya ini membawahi 3 (tiga) Kecamatan dengan 42 Nagori. Untuk menutupinya saya memberi tugas tambahan tugas kepada seluruh anggota untuk menyelenggarakan tugas Polmas. Anggota yang berada di unit-unit selain melaksanakan tugas sesuai bidangnya juga melaksanakan tugas Polmas pada saat mereka tidak sibuk”.

3.4. Nagori Senio

3.4.1 Situsi dan Kondisi

Nagori Senio sebagai bagian dari Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun adalah sebuah wilayah pedesaan yang terletak 10 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan Gunung Malela dan 13 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun. Nagori Senio adalah salah satu nagori terdekat dari Mapolsek Bangun dari 42 (empat puluh dua) nagori yang ada di wilayah hukum Polsek Bangun. Nagori Senio berbatasan dengan Nagori Serapuh di sebelah Utara, Sungai Bahbolon di sebelah

Selatan, Nagori Dolok Hataran di sebelah Barat dan Nagori Bagung di sebelah Timur. Luas wilayah Nagori Senio adalah 516 Ha dan terdiri dari 3 Dusun. Sebagian besar wilayah Nagori Senio adalah wilayah perkebunan terutama perkebunan sawit dan perkebunan karet baik yang dikelola pemerintah, swasta maupun perorangan.

Penduduk Desa Senio sebanyak 2.893 orang terdiri dari laki-laki 1.437 dan perempuan 1.456 orang dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 536 KK. Mayoritas penduduk Nagori Senio memeluk agama Islam yakni sebanyak 2.809 orang dan selebihnya beragama Kristen sebanyak 84 orang. Penduduk Nagori Senio sebagian besar bekerja dibidang swasta. Penduduk bekerja sebagai pedagang, buruh, karyawan perkebunan, tukang bangunan, guru, dan di bidang jasa.

Sebagai sebuah komunitas Desa Senio dihuni oleh mayoritas suku Batak Simalungun dan Jawa disamping masih ada sukubangsa-subangsa lainnya seperti Batak Karo, Batak Mandailing, dan Cina. Oleh karenanya kebudayaan yang dominan yang operasional dalam kehidupan masyarakat sehari-hari adalah kebudayaan Batak dan Jawa. Kebudayaan ini biasanya digelar dalam acara perkawinan. Ketika terjadi perkawinan antar sukubangsa maka kedua adat Batak dan Jawa dilaksanakan secara bergantian. Bahasa sehari-hari penduduk Nagori Senio adalah Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama namun dalam pergaulan sehari-hari sebagian besar warga menggunakan bahasa Batak dan bahasa Jawa.

Komunitas berdasarkan geografis (*Community by Geographyc Area*) yang ada di Nagori Senio terdapat 3 (tiga) komunitas yakni Dusun 1, Dusun 2 dan Dusun 3. Tiap-tiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun atau *gamot*. Komunitas berdasarkan kepentingan (*Community by Common Interest*) yang ada di wilayah Nagori Senio adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) buah. Warga dalam komunitas berdasarkan kepentingan tidak harus berada dalam satu wilayah tetapi bisa saja berasal dari beberapa wilayah namun memiliki kesamaan kepentingan. Data komunitas berdasarkan kepentingan yang ada di Nagori Senio dapat dilihat di Tabel 3.7..

Tabel 3.7.: Data Komunitas Berdasarkan Kepentingan di Nagori Senio

NO	KOMUNITAS	NAMA	
01	Pendidikan	A	SLTP Teladan Bangun
		B	MTs. Negeri Siantar
		C	SLTP Negeri 2 Siantar
		D	SD Negeri
		E	SD Inpres Dusun 1 Nagori Senio
		F	SD Inpres Dusun 2 Nagori Senio
		G	TK Iqroh Dusun 2 Nagori Senio
		H	TK Tunas Bangsa Kebun Bangun
		I	Taman Pendidikan Islam Al Rohman Dusun 2 Nagori Senio
		J	Taman Pendidikan Islam Al Huda Kebun Bangun
02	Keagamaan	A	Mesjid Al Rohman Nagori Senio
		B	Mesjid Al Huda Kebun Bangun
		C	Surau Nurul Ala Nurul Amin Dusun 3 Nagori Senio
		D	Gereja Kebun Bangun
03	Sosial	A	Serikat Nasrani
		B	Serikat Tolong Menolong Nagori Senio
		C	Serikat Tolong Menolong Kebun Bangun
		D	Perwiridtan Nagori Senio
		E	Perwiridtan Kebun Bangun
04	Kesehatan	A	Klinik Kebun Bangun
		B	Pos Yandu Kebun Bangun
		C	Pos Yandu Nagori Senio
05	Pemerintahan	A	Kantor Penghulu Nagori Senio
		B	Kantor Cabang Pendidikan dan Pengajaran
		C	Kantor Kebun PTPN 3 Kebun Bangun
		D	Kantor Afdelin Kebun Bangun

Sumber: Kantor Nagori Senio (telah diolah kembali)

3.4.2 Situasi Kamtibmas

Gangguan kamtibmas yang paling sering terjadi di Nagori Senio sesuai dengan catatan yang ada di Polsek Bangun Pencurian, Penganiayaan dan Penipuan/Penggelapan. Data kriminalitas yang terjadi di wilayah Nagori Senio periode Januari 2007 s/d Desember 2007 dapat dilihat pada Tabel 3.8..

Tabel 3.8.: Data Kriminalitas di Nagori Senio Periode Januari-Desember 2007

NO	JENIS KEJAHATAN	BULAN												Jlh
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pencurian Sawit/Getah	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	5
2	Pencurian di rumah	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3
3	Perjudian	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
4	Penipuan/Penggelapan	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4
5	Penganiayaan	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4
6	Zinah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
7	Penyeludupan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah		4	-	2	2	2	2	1	1	-	1	-	4	19

Sumber: Anev Bulan Jan 2008 Polsek Bangun (telah diolah kembali)

Berdasarkan data diatas maka kasus kejahatan yang paling sering terjadi adalah kasus pencurian sawit sebanyak 5 (lima) kasus diikuti dengan kasus penganiayaan, penipuan dan penggelapan 4 (empat) kasus dan pencurian di rumah sebanyak 3 (tiga) kasus. Jika dilihat dari angka kejahatan yang terjadi maka Nagori Senio dapat dikategorikan sebagai daerah aman karena rata-rata kejahatan yang terjadi selama periode tahun 2007 adalah 1,5 kasus per bulan. Dalam kenyataannya jika angka kejahatan atau catatan kejahatan yang di Polsek dibandingkan dengan tingkat keresahan warga maka terdapat perbedaan. Warga mengatakan bahwa hampir tiap hari ada pencurian. Rumah warga sering dibobol maling karena rumah ditinggal dalam keadaan kosong pada siang hari. Pada malam hari pencuri biasanya mengambil perlengkapan mobil truk yang di parkir di pinggir jalan. Beberapa warga Dusun 3 mengatakan bahwa:

“Nagori Senio ini nampak tenang-tenang saja Pak, karena warganya banyak yang bekerja ke kebun pada pagi dan siang hari dan kembali pada sore hari, tapi wilayah sini bukannya aman Pak. Di sini sering terjadi pencurian seperti pencurian Genset, Aki Mobil, besi jemuran, sandal dan sepatu, tapi warga malas lapor polisi karena setelah lapor polisi kemudian datang ke TKP setelah itu polisi minta uang atau rokok untuk biaya operasional padahal barang juga tak ketemu.”

Dari hasil survei yang dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan dan isian atau angket kepada warga maka diperoleh data mengenai kejahatan yang sangat meresahkan warga Nagori Senio. 59% warga mengatakan bahwa kejahatan yang sangat meresahkan adalah pencurian sawit, 58% mengatakan pencurian di rumah-rumah, 53% masalah narkoba, 22% kejahatan pembunuhan, 21% masalah perkelahian dan 15% masalah perjudian. Selain itu masih ada kejahatan-kejahatan lain yang bagi warga meresahkan dapat dilihat pada Tabel 3.9..

Tabel 3.9.: Data Kejahatan Yang Sangat Meresahkan Warga

Kejahatan Yang Meresahkan Warga	Komunitas				Jlh	%
	Geografis	%	Kepentingan	%		
Pembunuhan	19	26	3	11	22	22
Pencurian di Lingkungan (Ayam, Kambing, Sendal, Aki Mobil, Genset, Jemuran, Motor, dan Tiang Jemuran,)	49	66	10	38	59	58
Curanmor	4	5	-	-	4	4
Pencurian Sawit	41	55	19	73	60	59
Penganiayaan (Perkelahian, Pengeroyokan, Pemukulan)	18	24	3	11	21	21
Narkoba	42	57	11	42	53	52
Perjudian	13	17	2	8	15	15
Pengancaman	3	4	1	4	4	4
Perusakan	4	5	1	3	5	5
Pemeriksaan	8	11	-	-	8	8
Pencopetan	2	3	-	-	2	2
Penculikan	3	4	-	-	3	3
Penodongan Malam Hari	1	1	-	-	1	1
Perzinahan	1	1	-	-	1	1
Perampokan	4	5	5	19	9	9
Kebakaran	3	4	1	3	4	4

Dari data tersebut di atas terdapat beberapa jenis kejahatan yang dianggap oleh warga sebagai sesuatu yang meresahkan namun tidak terdapat dalam catatan polisi. Keresahan biasanya dirasakan oleh warga dikarenakan oleh 2 (dua) hal yakni: pertama, warga tersebut merupakan korban dari kejahatan itu sendiri dan kedua, warga melihat, merasakan atau mendengar adanya kejahatan namun tidak ditangani oleh polisi secara layak. Pelaku kejahatan tersebut tidak diproses secara hukum. Kejahatan perjudian, mabuk-mabukan, narkoba, pengancaman, dan sebagainya merupakan peristiwa kejahatan yang sehari-hari terjadi di tengah-tengah warga. Kenyataannya kejahatan-kejahatan tersebut tidak terdata oleh polisi. Perbedaan catatan tentang kejahatan yang di miliki Polsek Bangun dengan kejahatan yang meresahkan atau dikuatirkan oleh warga terjadi karena banyak peristiwa kejahatan yang tidak dilaporkan oleh warga kepada polisi. Dari hasil wawancara dan survei yang dilakukan maka selain pencurian sawit tindakan kejahatan yang meresahkan warga adalah masalah narkoba, pembunuhan, perjudian dan pencurian di rumah.

3.5. Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio

Pembentukan pengurus atau anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) dilaksanakan bersamaan dengan peresmian Balai Kemitraan Polisi-Masyarakat (BKPM) Kecamatan Gunung Malela. BKPM Kecamatan Gunung Malela diresmikan oleh Wakapolres Simalungun pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2006. BKPM yang diresmikan tersebut berbeda dengan BKPM hasil kerjasama Mabes Polri dengan negara donor seperti Jepang dan Belanda. BKPM hasil kerjasama antara Mabes Polri dengan negara donor adalah merupakan pos polisi. Pos polisi tersebut dibuat sebagai pos yang lebih ramah kepada warga. Personil yang mengawaki BKPM tersebut seluruhnya adalah anggota polisi aktif yang telah dilatih dan memiliki kemampuan mengimplementasikan pemolisian komunitas. Sementara itu BKPM Kecamatan Gunung Malela yang diresmikan pada saat pencaanangan Polmas merupakan kantor atau balai tempat anggota FKPM melaksanakan kegiatan seperti pertemuan dengan warga dan

menyelesaikan administrasi kegiatan FKPM. Bangunan BKPM tersebut adalah milik warga.

Peresmian Balai Kemitraan Polisi-Masyarakat (BKPM) Kecamatan Gunung Malela merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Kapolri No.Pol.:Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Telegram Kapolda Sumut No.Pol.:ST/326/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pelaksanaan Pencanangan Polmas yang secara serentak di jajaran Polda Sumut yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2006. Dengan dasar tersebut kemudian Kapolres Simalungun pada saat itu menetapkan Polsek Bangun sebagai Polsek percontohan dilaksanakan Polmas untuk jajaran Polres Simalungun dengan membentuk BKPM sesuai dengan Surat Kapolres Simalungun No.Pol.: B/1023/III/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Menyiapkan Balai Kemitraan Polisi-Masyarakat (BKPM).

Rencana pembentukan Balai Kemitraan Polisi-Masyarakat (BKPM) diawali dengan tahap sosialisasi tentang Polmas kepada warga. Beberapa warga sebagai perwakilan warga dilibatkan untuk mengikuti tahap sosialisasi Polmas. Sosialisasi dilakukan dengan harapan agar warga memahami konsep Pemolisian Komunitas dan maksud pembentukan Balai Kemitraan Polisi-Masyarakat (BKPM). Dalam penjelasannya disampaikan bahwa sebagai wujud implementasi Polmas maka akan diresmikan Balai Kemitraan Polisi-Masyarakat (BKPM). Perwakilan warga yang telah ditunjuk kemudian dikumpulkan dan diberikan penjelasan tentang rencana pembentukan Balai Kemitraan Polisi-Masyarakat (BKPM). Penjelasan yang diberikan antara lain adalah Balai Kemitraan Polisi-Masyarakat (BKPM) ini nantinya digunakan sebagai tempat atau kantor atau sekretariat bagi forum kemitraan bekerja. Balai tersebut juga dijadikan sebagai tempat konsultasi bagi warga dan polisi untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada ditengah-tengah warga sebelum ditangani oleh polisi. Masalah yang dapat ditangani oleh Balai Kemitraan Polisi-Masyarakat (BKPM) adalah Tipiring seperti pencurian kecil-kecilan, konflik dalam warga dan masalah yang ringan-ringan. Dalam pertemuan tersebut Kapolsek Bangun meminta kepada warga untuk mendukung rencana tersebut dengan menyediakan lahan dan bangunan sebagai kantor BKPM. Balai

Kemitraan Polisi-Masyarakat (BKPM) Kecamatan Gunung Malela menggunakan bangunan milik CV.Niaga yang sedang tidak digunakan oleh pemiliknya. Seorang anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio mengatakan bahwa:

“Awalnya pada waktu itu Kapolsek memanggil kami ke Polsek kemudian Kapolsek menyampaikan bahwa Polsek Bangun ditunjuk oleh Kapolres sebagai Polsek percontohan dalam penyelenggaraan Polmas dan selanjutnya Kapolsek mengutarakan rencana Polsek untuk meresmikan BKPM. Kapolsek juga mengatakan kalau nantinya BKPM ini akan difungsikan sebagai tempat menyelesaikan masalah warga sebelum ditangani polisi dan balai ini akan dikelola oleh anggota masyarakat yang terdiri dari wakil warga yang berasal dari LSM, wartawan, dan lain-lain. Karena keperluannya mendesak maka Pak Sutarman (Ketua FKPM Nagori Senio) menawarkan sebuah bangunan milik CV.Niaga yang kebetulan sedang tidak digunakan. Kemudian rumah tersebut diresmikan oleh Kapolres sebagai kantor BKPM Kec.Gunung Malela”.

Kantor Balai Kemitraan Polisi-Masyarakat (BKPM) Kecamatan Gunung Malela terletak di Jl.Asahan Km.14 Senio. Lokasi bangunan tersebut berada di pinggir jalan raya yang menghubungkan Kota Pematang Siantar dengan Kecamatan Perdagangan Kabupaten Simalungun. Bangunan ini merupakan milik CV.Niaga yang dipinjam pakaikan sebagai kantor Balai Kemitraan Polisi-Masyarakat (BKPM) Kecamatan Gunung Malela. CV.Niaga adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha penggilingan padi dan tadinya memiliki lebih dari 200 karyawan.



Gambar 3.3.: Bangunan BKPM Kec.Gunung Malela

Pengadaan kantor BKPM Kec.Gunung Malela bertujuan untuk dapat digunakan oleh polisi dan warga sebagai tempat untuk berkonsultasi, berkomunikasi memecahkan masalah sosial yang ada di tengah-tengah warga. Rencananya kantor tersebut dijadikan sebagai sekretariat bagi FKPM-FKPM yang akan dibentuk di seluruh Kecamatan Gunung Malela. Sesuai dengan target bahwa FKPM dibentuk ditingkat desa atau kelurahan maka logikanya FKPM yang ada di Kecamatan Gunung Malela adalah sebanyak 16 FKPM karena jumlah Nagori yang ada di Kecamatan Gunung Malela ada sebanyak 16 Nagori.

Namun karena lokasi, sarana dan prasarana yang tidak memadai maka balai ini jarang digunakan. Bahkan sampai saat ini menurut salah satu anggota FKPM, baru sekali digunakan setelah diresmikan. BKPM Kecamatan Gunung Malela tidak dilengkapi dengan fasilitas guna mendukung kegiatan FKPM seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Karena bangunan tidak pernah digunakan lagi maka kondisi bangunan BKPM Kec.Gunung Malela menjadi tidak terawat.

Pada saat meninjau kantor BKPM Kec.Gunung Malela terlihat jika bangunan ini sudah lama tidak digunakan. Lantai ruangan kotor, kursi dan meja dipenuhi debu dan udara pengap. Bahkan sebagian dokumen di BKPM Kec.Nagori Senio terbakar. Anggota Ba Polmas menerangkan:

“Sebagian dokumen BKPM dibakar oleh orang gila. Setelah rumah tersebut dijadikan BKPM Kec.Gunung Malela maka pintu selalu terbuka dan gerbang tidak pernah dikunci. Akibatnya ada orang gila yang masuk dan

berteduh di dalam dan suatu saat ia membakar sebagian dokumen BKPM, mungkin dikiranya kertas sampah”.

Kantor BKPM Kec.Gunung Malela terdiri dari beberapa ruangan yakni Ruang Ketua FKPM, Ruang Rapat, dan Ruang Pemecahan Masalah. Kondisi Ruang Ketua FKPM dan Ruang Rapat pada saat peneliti melakukan kunjungan dalam keadaan kosong, tidak ada meja ataupun kursi, lampu tidak menyala, kondisi lantai basah karena ada bagian atap yang bocor. Keadaan tersebut terjadi karena ruangan tersebut sudah lama tidak pernah digunakan lagi. Berbeda dengan Ruang Pemecahan masalah. Kondisinya lebih baik. Dalam ruangan tersebut ada beberapa meja dan kursi. Pada ruangan tersebut terdapat satu papan panel data yang menggambarkan wilayah Kecamatan Gunung Malela dan sekilas gambaran kondisi geografi dan demografi Kecamatan Gunung Malela.

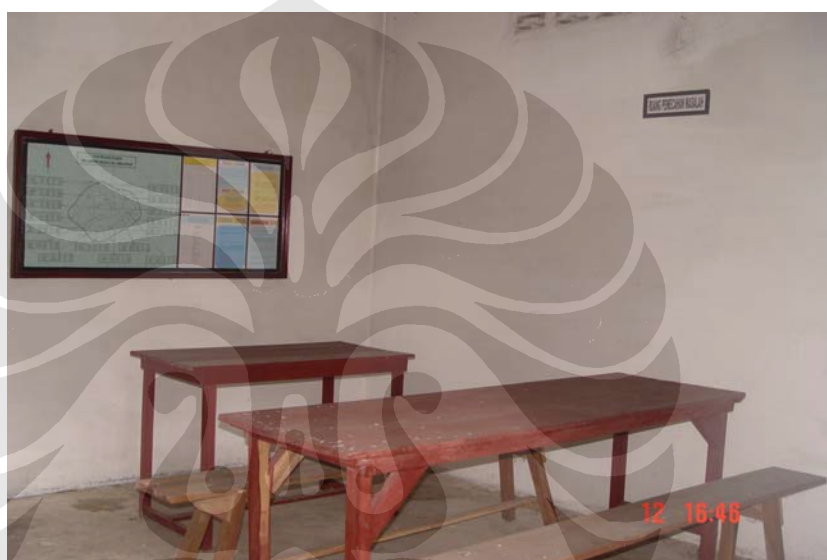


Gambar 3.4.: Ruang Rapat dan Ruang Kerja Ketua FKPM

Kelengkapan Kantor BKPM Kec. Gunung Malela saat ini hanya terdiri dari beberapa kursi dan meja. Kondisi ini terjadi karena sejak BKPM Kec.Gunung Malela diresmikan belum pernah ada upaya untuk melengkapi balai ini dengan perlengkapan kantor yang memadai untuk mendukung tugas anggota FKPM.

Pemerintah dalam hal ini Camat dan Pengulu belum pernah memberi dukungan terhadap BKPM Kec.Gunung Malela. Anggota Ba.Polmas menerangkan:

“Upaya pengadaan dan operasional BKPM ini sepenuhnya upaya Polsek. Walaupun teorinya BKPM didukung oleh pemerintah tapi kenyataannya Polsek yang sibuk mengurusnya. Kapolsek pening juga menyiapkan tempat dan mengadakan acara peresmian BKPM ini. Kami sudah pernah mengajukan permohonan dana kepada Camat tapi tidak bisa lagi karena sudah ketok palu katanya. Sampai sekarang Polsek sendirilah yang ngurusi BKPM.”



Gambar 3.5. : Ruang Pertemuan/Pemecahan Masalah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Camat Gunung Malela maka sebenarnya pemerintah bukan tidak mau mendukung hanya saja Kapolsek kurang koordinasi dengan Camat. Kapolsek terkesan jalan sendiri ketika hendak mengadakan BKPM Kec.Gunung Malela. Peresmian BKPM Kec.Gunung Malela sangat mendadak sehingga semuanya serba mendadak. Camat menerangkan bahwa:

“Saya mengetahui BKPM ketika diundang untuk hadir pada saat peresmian. FKPM pun saya ketahui setelah Kapolres Simalungun memberikan penjelasan setelah peresmian tersebut. Kapolsek yang lama tidak melakukan koordinasi dengan Camat terlebih dahulu tentang rencana pembentukan BKPM sehingga para penghulu dan warga kurang respon terhadap rencana yang disampaikan oleh Kapolsek. Bapak bisa lihat BKPM yang sudah

dibentuk, lokasinya saja jauh dari Kecamatan dan tempatnya tidak layak padahal namanya BKPM Kec.Gunung Malela. Seharusnya Camat Gunung Malela ikut bertanggung jawab. Masyarakat saja mungkin takut ke tempat itu karena di rumah tersebut katanya pernah terjadi kasus pembunuhan”.

Karena kondisi BKPM Kec.Gunung Malela yang kurang layak hingga sampai sekarang BKPM tersebut hanya sekali digunakan. Warga melihat bahwa lokasi BKPM Kec.Gunung Malela terlalu jauh dari pemukiman warga. Kecamatan Gunung Malela terdiri dari 16 (enam belas) Nagori. Dengan kondisi tersebut tidak mudah bagi warga untuk menjangkau BKPM tersebut. Seorang warga menerangkan: “Kalau membicarakan suatu masalah kenapa harus ke BKPM. Kan lebih mudah kita bicara di rumah Pangulu atau di kedai kopi. Kalau harus ke BKPM warga jadi malaslah”.

Pengurus Balai Kemitraan Polisi-Masyarakat (BKPM) Kecamatan Gunung Malela secara resmi dibentuk pada tanggal 25 Juli 2006. Dengan Surat Keputusan Kapolsek Bangun No.Pol.: Skep/06/VII/2006 maka ditetapkan Drs.Sutarman sebagai Ketua, Darsono sebagai Wakil, Aiptu Nasrul sebagai Sekretaris, Aladin Bsc sebagai Bendahara, Ir.Samsuheri, Legirin dan Suwarno masing-masing sebagai anggota. Kepengurusan Balai Kemitraan Polisi-Masyarakat (BKPM) Kec.Gunung Malela terdiri dari 7 (tujuh) orang yang langsung ditunjuk oleh Kapolsek Bangun. Pengurus Balai Kemitraan Polisi-Masyarakat (BKPM) berasal dari komunitas Pujakesuma Nagori Senio. Adapun susunan kepengurusan Balai Kemitraan Polisi-Masyarakat (BKPM) dapat dilihat pada Tabel 3.10..

Tabel 3.10. : Daftar Nama Anggota FKPM Nagori Senio

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Sutarman	Ketua	Tomas
2.	Darsono	Wakil	Toga
3.	Aiptu Nasrul	Sekretaris	Ba.Polmas
4.	Aladin Bsc	Bendahara	Pengusaha
5.	Ir.Samsuheri	Anggota	Todat
6.	Legirin	Anggota	LSM
7.	Suwarno	Anggota	Toda

Kepengurusan tersebut diatas pada awalnya ditunjuk sebagai pengurus BKPM Kec.Gunung Malela. Dalam perkembangannya kemudian terbentuklah

FKPM di Nagori-nagori lain seperti FKPM Nagori Nusa Harapan Kecamatan Siantar, FKPM Nagori Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas, dan FKPM Nagori Dolok Hataran Kecamatan Siantar. Dengan terbentuknya FKPM-FKPM tersebut maka pengurus BKPM Kecamatan Gunung Malela secara langsung menjadi pengurus FKPM Nagori Senio karena seluruh pengurus BKPM Kecamatan Gunung Malela adalah warga Nagori Senio. Tugas anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) antara lain: pertama, memonitor situasi, mengidentifikasi masalah dan memprioritaskan pemecahan masalah yang menyangkut tindak kejahatan, pelanggaran dan mencari solusi penyelesaian, kedua, mempelajari bentuk-bentuk gangguan dan sumber penyebab terjadinya pelanggaran dan kejahatan, ketiga, mengkaji dan menganalisa setiap permasalahan sosial dan kejahatan yang memerlukan penanganan khusus dan terpadu dengan instansi terkait, keempat, menetapkan program kerja untuk pencegahan kejahatan dan menjamin keamanan serta keteriban di Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun, dan kelima, menampung dan menyalurkan laporan masyarakat yang berkaitan dengan masalah sosial, kejahatan dan pelanggaran.

Kepengurusan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Nagori Senio belum memperhatikan keterwakilan anggota masyarakat baik yang berdasarkan geografi maupun berdasarkan kepentingan. Pengurus Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Nagori Senio semuanya adalah warga Nagori Senio yang merupakan warga komunitas Puja Kesuma Nagori Senio. Pengurus Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Nagori Senio bukan orang-orang yang mewakili kelompok berdasarkan etnik, gender, kepercayaan, pekerjaan dan usia karena mereka ditunjuk bukan atas dasar pemilihan namun direkrut langsung oleh Kapolsek. Salah satu Pengurus Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Nagori Senio menjelaskan bahwa:

“ Kami anggota Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Nagori Senio saat ini tidak melalui pemilihan yang melibatkan warga Kec.Gunung Malela. Pada waktu itu kami diminta Kapolsek mengikuti sosialisasi Polmas. Selanjutnya Kapolsek mengutarakan rencana Polsek untuk meresmikan BKPM. Kapolsek mengatakan kalau nantinya BKPM ini akan

dikelola oleh anggota masyarakat yang terdiri dari wakil warga yang berasal dari LSM, wartawan, dan lain-lain. Karena keperluannya mendesak maka kami diminta Kapolsek sebagai pengurus BKPM Kec.Gunung Malela. Kami sendiri bukan mewakili salah satu kelompok warga. Pembentukan BKPM saat itu mendadak dan akan diresmikan secara serentak di seluruh Sumut sehingga kami sebagai Pengurus BKPM Kec.Gunung Malela tidak melalui proses pemilihan tetapi diminta dan ditunjuk langsung oleh Kapolsek, dan kami diberikan surat keputusan pengangkatan.”

Kemudian peneliti menanyakan kepada pengurus BKPM Kec.Gunung Malela tentang keberadaan mereka mewakili sub-sub kelompok yang mana maka salah satu pengurus menerangkan bahwa :

“Kami sebenarnya bukan mewakili sub-sub kelompok yang ada dalam komunitas. Karena pada saat rencana peresmian BKPM mendesak maka Kapolsek menghubungi kami karena kami memang sudah kenal baik dengan polisi. Ketika ada rencana pembentukan BKPM maka kami diajak berdiskusi dan diminta menjadi pengurus BKPM. Karena ketentuan pengurus BKPM harus mewakili kelompok yang ada dalam masyarakat maka oleh Kapolsek kami ditentukan sebagai perwakilan Tomas, Toga, Toda, LSM, dan Pengusaha. Padahal sebenarnya bukan”.

Selama peneliti melakukan penelitian lapangan lebih kurang 2 (dua) bulan kantor BKPM Kec.Gunung Malela tidak pernah digunakan. Anggota FKPM tidak melakukan kegiatan karena anggota FKPM merasa tugas dan tanggung jawab anggota FKPM tidak jelas. Pada sosialisasi pertama di Polres Simalungun dijelaskan bahwa tugas anggota FKPM adalah menangani masalah-masalah ringan seperti perkelahian, pencurian ringan dan masalah-masalah lain yang melibatkan warga. Anggota FKPM akan didukung dengan perlengkapan seperti HT (*handy talky*), kartu anggota, seragam dan akan diberikan insentif. Kemudian pada sosialisasi yang kedua yang juga diadakan di Polres penjelasan tersebut berubah dimana dijelaskan bahwa tugas anggota FKPM hanya menangani masalah yang belum ditangani oleh polisi. Jika masalah sudah ditangani oleh polisi maka FKPM tidak boleh menanganinya. Tugas anggota FKPM

menginformasikan masalah-masalah sosial dan kejahatan kepada polisi. Anggota FKPM menjelaskan:

“Sekarang kami anggota FKPM sudah tidak aktif lagi Pak, karena kami sendiri jadi bingung karena pada sosialisasi yang pertama kami diberitahu bahwa FKPM akan menangani semua masalah-masalah yang melibatkan warga sehingga polisi tidak perlu menangani jika FKPM dapat menyelesaikan masalah dan kami juga diberitahu kalau anggota FKPM nantinya akan dilengkapi dengan HT (*handy talky*), seragam, kartu anggota FKPM, kendaraan dan akan diberi insentif. Tapi pada sosialisasi yang kedua ternyata berubah. Dukungan dari Polres tidak ada, insentif tidak ada, masalah yang ditangani juga hanya masalah-masalah yang ringan yang belum ditangani oleh polisi. Jika sudah ditangani oleh polisi maka FKPM tidak berhak menangani lagi. Kami juga diberi tugas baru menginformasikan ke polisi jika menemukan ada kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Kami merasa diperalat oleh Polres karena kami dijadikan sebagai informan. Kami keberatanlah Pak, bisa-bisa kami dimusuhi warga.”

Selama peneliti melakukan penelitian, anggota FKPM Nagori Senio tidak pernah mengadakan kegiatan di kantor BKPM. Anggota FKPM tidak aktif lagi karena tidak jelasnya petunjuk dari Polres tentang kegiatan FKPM. Anggota FKPM Nagori Senio merasa Polsek maupun Polres kurang memperhatikan operasinal FKPM. Hal tersebut sangat terlihat dari pelibatan anggota FKPM dalam kegiatan Polres maupun Polsek, fasilitas yang ada di kantor BKPM. Kondisi kantor saat ini tidak terawat, tidak ada sarana dan prasarana yang layak sebagai sebuah kantor, dan lokasinya yang agak jauh dari pemukiman warga.